

Solidaritas Masyarakat Sorong Raya Peduli HAM

BEM - UNIVERSITAS MUHAMMADY SORONG, PMKRI,
FIM-SOR, KNPB, FNMP, SONAMAPA, KOMUNITAS KAKI ABU, SKPKC-OSA, IPPM-IWARO, AMAN SORONG RAYA,
BENGGEL BUDAYA

SIARAN PERS

Senin 11 desember 2017 kami masyarakat Sorong Raya yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sorong Raya Peduli HAM

“ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
(UU.HAM No 39 – Pasal 1, Ayat 1)

Selama lima puluh enam (56) Tahun kekerasan demi kekerasan terjadi di Tanah Papua. Sungguh tragis, karena situasi ini tidak akan berakhir tanpa upaya mendekati persoalan secara lebih mendalam. Pemerintah pusat, dikatakan gagal memahami persoalan, ketika merespon peristiwa terbakarnya seorang anggota polisi 17/6, bukan mengusut peristiwa penembakan tersebut, justru mengirim penambahan satu kompi Pasukan Brimob ke Tanah Papua, Hal seperti ini terus berulang, seakan tak pernah ada evaluasi.

Rakyat Papua menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu yang terpenting adalah eksploitasi korporasi, yang sering diwakilkan oleh Freeport, atau korporasi lainnya. Eksploitasi ini melahirkan berbagai akses buruk pada peningkatan ekonomi, politik, dan sosial budaya Rakyat Papua. Kekayaan alam dijarah, rakyat dibunuh atau dipinggirkan, dan janji pembangunan berubah wujud jadi perusakan.

Terdapat kekhususan dan keumuman sejarah yang melekat pada Papua saat disandingkan dengan suku bangsa lain yang bergabung menjadi Indonesia. Sebagaimana terhadap daerah lain, Soekarno berusaha “memenangkan” Papua untuk bergabung dengan Republik Indonesia dalam semangat anti-kolonialisme. Dalam konteks tersebut, defenisi Indonesia adalah kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Nusantara dari cengkraman kolonial Belanda. Indonesia merupakan visi tentang jembatan emas, untuk mewujudkan masyarakat tanpa penindasan bangsa atas bangsa dan tanpa penindasan manusia atas manusia. Artinya, Soekarno telah membayangkan bahwa Rakyat Papua akan berada di atas jembatan emas yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang bersatu dalam sebuah falsafah kebinekaan bernama Indonesia.

Namun kudeta merangkak Soeharto yang terjadi antara tahun 1965-1968 membuyarkan impian tersebut. Soekarno tak sempat membuktikan komitmen anti-kolonialnya secara otentik di hadapan mayoritas Rakyat Papua. Di bawah kekuasaan Soeharto, pendekatan terhadap Papua lebih kental dengan praktik militeristik dan eksploitatif. Oleh sebagian kalangan, persoalan yang menjarah ini telah dikembangkan menjadi gugatan terhadap Ke-Indonesia-an orang Papua.

Gugatan yang kontroversial ini mengarah pada sebuah pertanyaan sensitif: apakah merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa yang terpisah merupakan pilihan terbaik saat ini? Jawaban akhirnya akan berpulang pada Rakyat Papua sendiri, dan tentu saja pemerintah Indonesia. Bagi Rakyat Papua, penting diingat, bahwa pendekatan yang militeristik dan eksploitatif oleh rezim Soeharto telah mempertemukan kesamaan nasib di antara Rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk Rakyat Papua. Lebih lanjut, eksploitasi modal asing yang semakin masif akhir-akhir ini sudah seharusnya kembali mempertemukan seluruh Rakyat Indonesia untuk menjawabnya bersama. Penguasa demi penguasa di Indonesia berganti tetap penanganan rakyat papua selalu menggunakan kekerasan dan mengedepankan cara cara militeristik disetiap masalah yang terjadi.

Sementara bagi penguasa di Indonesia, harus segera ada pembuktian atas komitmen anti kolonialisme yang pernah diajukan oleh Soekarno. Perubahan cara pandang pemerintah terhadap masalah Papua adalah satu kunci pembuktian tersebut. Sementara kunci lainnya adalah pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah, rumah sakit, dll., di seluruh pelosok Papua yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Rakyat Papua. Kekayaan Tanah Papua harus dikembalikan untuk dinikmati oleh Rakyat Papua; bila perlu disertai ‘denda’ atas kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu. Saat kampanye Pilpres, Jokowi berjanji akan menyelesaikan persoalan Papua dengan hati dan kerja nyata. Kini, setelah setahun lebih janji itu didengungkan, sudahkah Papua diurus dengan pendekatan hati?

Sejauh ini, memang ada upaya Jokowi untuk menunjukkan kepedulian dan perhatiannya kepada Papua. Dia berjanji akan mengunjungi Papua tiga kali dalam setahun. Sebelumnya, ada wacana Jokowi akan bangun Istana Kepresidenan di Papua. Sebelumnya juga, Jokowi memberikan grasi terhadap sejumlah tahanan politik (Tapol) Papua, termasuk Filep Karma. Namun, semua itu masih terkesan aksi simbolik. Belum merupakan sebuah perubahan cara pendekatan dan cara kerja dalam mengurus persoalan rakyat Papua. Akibatnya, keadaan-keadaan lama, yakni eksploitasi yang digadai dengan kekerasan, masih berlanjut hingga hari ini.

Tidak Percaya... ???

Salah satu contoh kasus dari deretan kasus di tanah papua Pada tanggal 23 Desember lalu, dua hari menjelang Natal, seorang Papua bernama Marcel Doga ditembak mati oleh aparat TNI di Kabupaten Keerom, Papua. Kejadian itu bermula saat korban meminta haknya sebagai buruh, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), kepada perusahaan sawit. Ironisnya, bukannya memenuhi tuntutan korban, perusahaan malah menggunakan TNI untuk mengusir korban hingga berujung penembakan.

Solidaritas Masyarakat Sorong Raya Peduli HAM

BEM - UNIVERSITAS MUHAMMADY SORONG, PMKRI,
FIM-SOR, KNPB, FNMPP, SONAMAPA, KOMUNITAS KAKI ABU, SKPKC-OSA, IPPM-IWARO, AMAN SORONG RAYA,
BENGGEL BUDAYA

Semua kejadian di atas menunjukkan bahwa pendekatan terhadap persoalan Papua belum berubah. Moncong senapan masih lebih dominan ketimbang dialog. Anggapan terhadap orang Papua, bahwa mereka separatis masih bercokol kuat di corak berpikir sebagian pemangku kekuasaan dan aparat TNI/Polri. Yang berubah paling-paling adalah kegiatan investasi yang makin digenjut untuk mengeksploitasi bumi dan kekayaan Papua. Sekarang sudah ada empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Papua, yakni Merauke, Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat. Sekarang bukan hanya perusahaan tambang, tetapi perusahaan perkebunan khususnya sawit juga mulai merambah setiap jengkal tanah Papua. Pertanyaannya kemudian :

Rakyat Papua akan dapat apa ... ???

Kami mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi untuk mengurus Papua dengan hati. Tetapi, perlu diingat, Presiden SBY juga dulu menjanjikan membangun Papua dengan hati. Tetapi yang terjadi kemudian: kekerasan tetap berlanjut, jumlah Tapol meningkat, dan Papua tetap provinsi termiskin di Indonesia.

Jokowi tidak boleh mengulang hal itu. Karena itu, Jokowi perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, sudah saatnya pemerintah lebih banyak mendengar suara orang-orang Papua, termasuk dalam urusan pembangunan. Jangan lagi Jakarta merasa serba tahu akan kebutuhan orang Papua. Padahal, belum tentu apa yang dirasa oleh Jakarta sebagai “kebutuhan Papua” benar-benar adalah kebutuhan rakyat Papua. Lagipula, setiap pendekatan politik dan ekonomi seharusnya mempertimbangkan tradisi dan budaya orang-orang Papua.

Untuk keperluan itu, sudah saatnya Jokowi membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua. Bukan hanya dialog dengan elit-elit Papua, tetapi juga dengan rakyat banyak. Kami kira, membangun Papua dengan hati harus dimaknai dengan pembangunan berbasis partisipasi Rakyat Papua. Namun, dialog tidak mungkin terjadi kalau orang-orang Papua masih dalam keadaan tertekan; ketika hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat orang Papua masih ditindas; dan ketika Jakarta masih menganggap Papua separatis dan alergi dengan segala yang berbau bintang kejora.

Nah, untuk memulihkan kepercayaan orang Papua terhadap Jakarta, dan sekaligus memungkinkan orang Papua merasa aman dan bebas menyatakan pendapatnya, maka pemerintahan Jokowi harus berani menarik TNI/Polri dari Papua. Pembangunan Kodam baru di Papua harus dihentikan. Sebab, tidak ada dialog bebas dan demokratis di bawah todongan senjata. Kedua, Papua sudah harus diajak bicara Indonesia sebagai sebuah proyek bersama. Di sini bukan sekedar menaruh semakin banyak orang Papua di pemerintahan dan badan perwakilan nasional, tetapi bagaimana gagasan-gagasan orang Papua mewarnai proyek bersama dan tujuan bersama kita sebagai sebuah bangsa.

Maka itu segera usut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua:

A. Sipol (Sipil Politik)

1. Kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014
2. Kasus penembakan di Aimas - Kabupaten Sorong, 30 april 2013
3. Kasus Wasior berdarah 13 juni 2001
4. Kasus Boswesen berdarah 2001
5. Kasus Biak berdarah 6 juli 1998
6. Kasus Wamena berdarah tahun 2003
7. Kasus penembakan Manokwari berdarah
8. Kasus Nabire berdarah 2001
9. Kasus Timika berdarah 1999
10. Kasus Uncen berdarah 2006
11. 10.Pembunuhan Theys Hiyo Eluway, 10 november 2001
12. 11.Abepura berdarah, 7 desember 2000

B. Ekosob (Ekonomi, Social, Budaya)

1. Menolak Perampasan tanah untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, Kab Sorong, Kab Sorong Selatan, Kab Kaimana, Kab Timika, Kab Boven Digul, Kab Nabire, Kab Fakfak, Kab Bintuni, Kab Mereuke, Kab Mappi, Kab Keerom, Kab Manokwari.
2. Menolak tambang mineral, migas yang tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemegang saham dalam investasi di Tanah Papua

Solidaritas Masyarakat Sorong Raya Peduli HAM

BEM - UNIVERSITAS MUHAMMADY SORONG, PMKRI,
FIM-SOR, KNPB, FNMP, SONAMAPA, KOMUNITAS KAKI ABU, SKPKC-OSA, IPPM-IWARO, AMAN SORONG RAYA,
BENGKEL BUDAYA

Solidaritas Masyarakat Sorong Raya Peduli HAM:

BEM - UNIVERSITAS MUHAMMADY SORONG, PMKRI, FIM - SOR, KNPB, FNMP, SONAMAPA,
KOMUNITAS KAKI ABU, SKPKC-OSA, IPPM-IWARO, AMAN SORONG RAYA, BENGKEL BUDAYA

Sorong, 11 Desember 2017

Abdulah Fatusalam Loji
(Kordinator Aksi)

Perwakilan

1. BEM – Universitas Muhamadiyah Sorong
2. PMKRI Cabang Sorong
3. FIM – SOR
4. KNPB
5. FNMP
6. SONAMAPA
7. KOMUNITAS KAKI ABU
8. SKPKC – OSA
9. IPPM – IWARO
10. AMAN SORONG RAYA
11. BENGKEL BUDAYA